

## Masyarakat Madani dan Tantangan Radikalisme

**Muhammad Rizkon Fawa'id**

Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: rizkonfawaid35@gmail.com

Keywords:	Abstract:
<i>Radicalism, pluralism, islamic teens, and madani of Indonesian society.</i>	<i>Today the religious behavior of Indonesian Muslim youth with two different ideological foundations namely Radicalism and Pluralism. Radicalism is the understanding of individuals or groups with ways of thinking, behaving, and rooted behavior or totality in achieving certain goals while pluralism is a way of living by understanding the acceptance of differences, openness of thought and act of respect for others. In Medina at that time, there were still conflicts between groups that never lived. Sometimes some groups make use of religiosity as part of the effort to cover commodities. So that the frame about maintaining public morality and religion still needs to be united in the framework of mutual understanding between each other and helping each other on what the community really needs. The challenge of Islamic groups called fundamentalist, exclusive, and radical is indeed possible to bring Indonesia to a state of society far from civilization and humanity. So that the great potential of Indonesian Muslim youth with a plural attitude will be able to bring Indonesia to the Madani community. This is certainly not as simple as the discourse, but young Indonesian Muslims must be able to become initiators in the midst of a multidimensional crisis in society.</i>

Kata kunci:	Abstrak:
<i>Radikalisme, pluralisme, dan masyarakat madani Indonesia</i>	<p>Dewasa ini perilaku beragama pemuda muslim Indonesia dengan dua landasan ideologi yang berbeda yaitu Radikalisme dan Pluralisme. Radikalisme yaitu paham individu atau kelompok dengan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku mengakar atau totalitas dalam mencapai tujuan tertentu sedangkan pluralisme adalah cara berkehidupan dengan paham penerimaan perbedaan, keterbukaan berpikir dan bertindak juga menghargai sesama. Dapatlah dilihat bahwa potensinya memang besar menuju masyarakat madani tapi nampak bahwa permasalahan di madinah kala itu yaitu konflik antar kelompok yang tak kunjung usai masih terus ada. Terkadang beberapa kelompok memanfaatkan religiusitas sebagai bagian dari upaya penyelamatan komoditas. Sehingga frame tentang menjaga moralitas publik dan beragama masih perlu disatukan dalam rangkai saling memahami antar sesama dan saling membantu pada hal yang memang dibutuhkan masyarakat. Tantangan kelompok islam yang disebut fundamentalis, eksklusif, dan radikal memang berkemungkinan membawa Indonesia pada kondisi masyarakat yang jauh dari keadaban dan kemanusiaan. Sehingga pada potensi besar pemuda muslim Indonesia dengan sikap plural akan mampu membawa Indonesia pada masyarakat Madani. Ihtiar ini tentu tak sederhana wacananya akan tapi pemuda muslim Indonesia harus mampu menjadi inisiator ditengah krisis multidimensional masyarakat.</p>

Received: September 17, 2019. Revised: October 15, 2019. Accepted: October 18, 2019

### 1. Pendahuluan

Menjadi cita-cita bersama bagi penduduk Indonesia dan muslim khususnya yang berperadaban dan mandiri, relasi sosialnya didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan masyarakatnya bertakwa kepada Allah Swt. Prinsip ini dapat digunakan dalam membangun peradaban yang demokratis dalam artian yang substansial, berkeadaban, berkeadilan, egaliter,

dan juga menjunjung tinggi prinsip moralitas antar sesama manusia dan alam. Sekiranya seperti inilah tatanan masyarakat Indonesia dalam kondisi ideal dan yang disebut oleh Prof. Nurcholis Majid sebagai tatanan masyarakat Madani.

Berdasarkan pada tinjauan Al-qur'an idealnya masyarakat adalah *Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan maha pengampun) dimana masyarakatnya bercirikan umat yang satu, tegaknya musyawarah dalam berbagai urusan, tegaknya keadilan, tumbuhnya persatuan dan kejama'ahan, adanya kepemimpinan yang berwibawa dan taat kepada Allah Swt. Dan tidak menghina antara sesama. (lihat Q.S. Al-Baqarah: 213)

Wacana masyarakat ini masih sangat sesuai dengan kondisi Indonesia hari ini dimana keberagaman Suku, agama, dan Ras yang tentunya sebagian dari ini secara deterministik sudah ada pada masyarakat Indonesia. Tafsir menurut Ustadz Musyafa Lc tentang tatanan masyarakat tersebut adalah Negeri yang selaras antara kebaikan alam dan perilaku penduduknya, penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa untuk bersyukur, seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani penduduknya, aman dari musuh baik dalam maupun luar, maju dalam ilmu pengetahuan juga teknologi dan terakhir harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, yaitu dengan terwujudnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.

Pertanyaannya kenapa wacana masyarakat madani begitu penting dibanding dengan tatanan masyarakat ideal dalam perspektif lain? Dari segi dasar negara sangat dekat sekali dengan Pancasila seperti nilai ketauhidan, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi, dan keadilan sosial. Pada tinjauannya masyarakat madani merujuk pada sistem tatanan sosial masyarakat madinah dan salah satu simbolnya pada piagam madinah.

Penting dalam hal ini peran remaja muslim mencapai cita-cita tersebut yang masih segar akan ide-ide nya, semangat, tenaga, dan seharusnya terkait keterbukaan dalam menerima berbagai pandangan dan ilmu. Seperti Muhammad Al-Fatih yang mampu membawa kemenangan peradaban Islam di usia muda, KH. Ahmad Dahlan dengan Islam modernitasnya, Munir dengan Islam kemanusiaannya, dan Muzzamil Hasballah dengan Islam syariatnya.

Salah satu tantangan gerakan remaja muslim Indonesia adalah potensi paham radikal yang sudah ada sejak dini pada mereka, data dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2017 mencatat sekitar 39 remaja dengan kalkulasi 24 persen mahasiswa dan 23.3 persen pelajar SMA setuju Jihad dengan kekerasan demi tegaknya Negara Islam. Jumlah yang cukup besar menurut penulis karena tingkat radikalisme sudah melekat pada paradigma berpikir remaja SMA yang seharusnya masih mempelajari berbagai wacana, ilmu, dan ideologi.

Ditambah dengan data Riset Setara Institute, dipaparkan oleh Halili selaku Direktur bahwa terdapat 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar paham radikalisme. Ia juga mengatakan gelombang radikalisme pada 10 PTN tersebut dibawa oleh kelompok-kelompok keagamaan yang cukup eksklusif seperti salafi-wahabi, tarbiyah, dan tahririyah. Corak kegiatan keislaman di kampus (yang terpapar radikalisme) itu monolitik dan cenderung dikooptasi oleh golongan Islam tertentu yang tertutup atau eksklusif. Pada beberapa fenomena di perguruan tinggi Malang salah satu perguruan tinggi negeri yang salah satu anggota kelompok Islam eksklusifnya berstatus sebagai dekan turut mendakwahkan Islam beraliran radikal. Aktor-aktor kunci ini memainkan peranan sebagai *Structural Opportunity* dan mendestruksi *enabling environments* bagi perkembangan wacana dan gerakan eksklusif di kampus.

Penjelasan fenomena di atas tidak bermaksud menyudutkan pihak tertentu dan membela pihak tertentu, penelitian ini akan menjelaskan relasi sosial sebagai implementasi beragama dari kelompok-kelompok Islam kusus nya remaja, membahas juga relasi dalam kelompok yang

radikal dan sejauh mana bermanfaat untuk sesama sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Andri Rosadi menjelaskan dalam bukunya Hitam Putih FPI bahwa kelompok-kelompok Islam radikal juga sering tersudutkan walaupun melakukan aktifitas keagamaan yang tidak menunjukkan sikap radikalnya seperti saat terjadi bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 masih dituduh gerakan kelompok-kelompok radikal padahal semangat yang mereka bawa adalah saling membantu antar muslim dan kemanusiaan.

Tantangan kelompok Islam yang disebut fundamentalis, eksklusif, dan radikal memang berkemungkinan membawa Indonesia pada kondisi masyarakat yang jauh dari keadaban dan kemanusiaan. Sehingga pada potensi besar pemuda muslim Indonesia dengan sikap plural akan mampu membawa Indonesia pada masyarakat Madani. Inhtiar ini tentu tak sesederhana wacananya akan tapi pemuda muslim Indonesia harus mampu menjadi inisiator ditengah krisis multidimensional masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang secara umum dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Metode ini bersifat induktif atau dari khusus ke umum, sehingga berangkat dari bawah. Penelitiannya juga tidak menggunakan mengharuskan adanya hipotesis, dan walaupun ada hipotesis peneliti tidak wajib memberikan pembenaran atas hipotesis tersebut. Hasil dari penelitian kualitatif juga tidak berupa angka akan tetapi deskripsi, erkecuali dalam pengumpulan data metode penelitian kualitatif dapat mengumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif akan tetapi pada tabulasi data dan kesimpulan tetap menghasilkan deskripsi penelitian.

Desain penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dimana objek utama penelitian adalah literature terkit, riset, dan jurnal-jurnalnya. dengan penelitian ini hasil data akan lebih integratif dalam merangkai fakta sehingga ketika disimpulkan dianalisis akan memunculkan solusi dan saran yang lebih komperhensif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### a. Refleksi Tradisi Islam Dalam Membangun Masyarakat Madani Di Indonesia

Mari sejenak melihat bagaimana tradisi Islam berkontribusi pada pencapaian wacana masyarakat madani Indonesia. Berikut akan membahas kelompok-kelompok gerakan Islam khususnya pemuda Islam beserta pengaruh pengaruhnya akan tetapi terlebih dahulu penulis akan menjelaskan seperti apa masyarakat madani itu beserta karakteristiknya, sejarah masyarakat madani, dan bagaimana masyarakat madani itu penting menjadi cita-cita bersama di Indonesia.

### b. Karakteristik Masyarakat Madani

Wacana masyarakat madani merujuk pada tindakan masyarakat ataupun umat Islam yang terlibat aktif dalam semua sector ekonomi, social, politik, dan budaya (Yunanto 2017: 21). focus definisi masyarakat madani tidak bisa sepenuhnya di seajarkan dengan citacita Negara bangsa (*Nation State*) karena dalam pemahaman Islam masih relatif baru dikaji sehingga gagasan masyarakat madani bersifat inheren dalam Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kerja kerja kolektif pada masyarakatnya.

Prinsip ini tentu merujuk pada citacia Islam sebagai agama yang menyayagi keseluruhan alam (*rahmatan lil' alamin*) dan dalam firman Allah juga sering memerintahkan umat Islam untuk hidup berkomunitas guna mempermudah mencapai tujuan bersama Islam. Pandangan ini dalam Islam juga sering disebut dengan *jama'ah Islamiyah*. jika demikian setiap

muslim yang berkelompok untuk mencapai cita-cita Islam adalah *jama'ah Islamiah* termasuk HMI, akan tetapi sering di salah gunakan maknanya karena *framing media* bahwa *jama'ah Islamiah* hanyalah kelompok jaringan teroris ataupun ekstrimis Islam. Padahal jika kita merujuk pada pengertian aslinya adalah semangat umat Islam untuk selalu hidup berkomunitas agar mencapai tujuan masyarakat, dan menyelesaikan masalah sosial yang mencakup semua sektor kehidupan: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dengan definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa definisi *jama'ah Islamiah* menjadi embrio dari konsep masyarakat madani di Indonesia.

*Jama'ah Islamiah* juga diimplementasikan dalam bentuk mekanisme pengambilan keputusan, yaitu musyawarah atau disebut juga *shura*. Dari definisi dan bentuk gerakannya tradisi Islam telah memberikan sumbangan penting bagi perkembangan gagasan masyarakat madani di Indonesia. Setelah ini kita akan mengkaji sejauh mana kontribusi ini berperan di sejarahnya dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Menjadi menarik untuk dikaji ketika beberapa aspek ini pening sejauh mana tradisi Islam seimbang dari berbagai aspek ini khususnya di wilayah ekonomi.

### c. Sejarah Masyarakat Madani

Awal mula konsep masyarakat madani ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim, tokoh terkemuka kedua di Malaysia setelah M. H. M. Muhahir Muhammad saat ceramah dalam acara Festival Istiqlal pada tahun 19. Namun dalam perspektif Prof. M. Dawam Raharjo istilah masyarakat Madani diperkenalkan oleh M. Amin Rais, meskipun yang punya peranan besar dalam mensosialisasikannya adalah Swab Mahasin melalui pengantarnya terhadap buku *Masyarakat Madani* karya Ernest Gellner (1999). Tidak hanya beberapa tokoh tersebut, salah satu cendekiawan muslim Indonesia terkemuka Prof. Nurcholis Majid atau akrab di panggil Cak Nur.

Menurut Cak Nur, masyarakat Madani sebenarnya adalah merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nab Saw di negeri Madinah. Beberapa karakteristik masyarakat madani di Madinah adalah sebuah tatanan masyarakat yang tumbuh berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, *Civility* (berkeadaban), keadilan egaliter, dan juga prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis perlu diseimbangi kualitas demokrasi pada masyarakat berupa partisipasi aktif masyarakat dalam terlibat kebijakan-kebijakan public, kualitas SDM yang mumpuni, jalannya musyawarah pada masyarakat dan penerimaan perbedaannya. Dari hal tersebut terang bahwa sistem pemerintahan tidak parsial antara pemerintah birokrasi dan masyarakat akan tetapi kedua pihak ini terintegrasi dalam mencapai cita-cita bersama.

Masyarakat seperti inilah yang dicirikan oleh Prof. Nurcholis Majid dan tentunya menjadi penting untuk cita-cita masyarakat Indonesia karena sejalan dengan sistem demokrasi, corak masyarakat Indonesia, dan Pancasila. Masyarakat Indonesia mencitacitakan masyarakat yang bersatu dan diikat oleh rasa persatuan nasional, tujuannya adalah untuk membangun Negara yang majemuk, tidak membedakan ras, suku, agama, golongan, etnis, jumlah follower dan like di status maupun photo social media.

### d. Refleksi Masyarakat Madani di Indonesia

Karakteristik masyarakat madani di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti peranan Islam dalam politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa aspek ini dapat kita kaji sejauh mana peran positifnya dan sejauh mana masyarakat madani ini sudah terwujud dengan indikator klasifikasi masyarakat madani telah dijelaskan. Setelah dilihat beberapa aspek tersebut

dapat juga kita lihat sejauh mana aspek aspek tersebut sudah seimbang dalam porsinya masing-masing.

### 1) Politik

Meskipun pada walnya gerakan islam di era kemerdekaan diawali oleh aktivitas perdagangan, tapi kontribusi islam diwilayah politik tidaklah sedikit. Akrab disebut Sarekat Dagang Islam (SDI) yang berubah tujuan dan namanya. Awal dari pembentukan organisasi ini adalah untuk membentuk sebuah lembaga yang mengakomodir kebutuhan semua pedagan islam dan berlatar belakang dari kecemburuan social umat muslim terhadap kelompok dagang cina yang mampu menguasai pasar pada saat itu. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI) yang berpartisipasi dalam ranah politik yaitu upaya kemerdekaan Indonesia.

Dalam semangat pembentukan Negara, umat muslim Indonesia pernah menentang Negara Islam yang dibungkus dengan gerakan Darul Islam, dikenal dengan pemberontakan “ekstrem kanan” sekain itu, ketika bangsa ini memasuki system demokrasi, kelompok *Jama'ah islamiyah* telah berperan aktif dalam pembentukan partai politik, meskipun mereka secara resmi masih sebagai organisasi social yang dalam beberapa fungsi sebagai kelompok kepentingan dan penekan.

Distribusi peran yang cukup besar juga terjadi pada *Jama'ah Islamiyah* yang terwujud dalam ormas islam dan organisasi mahasiswa islam seperti HMI yang berperan dalam pendelegasian dan perkaderan pada tokoh-tokoh politik di Indonesia. Bahkan yang lebih besar lagi perannya adalah pembentukan partai politik seperti PPP, Partai Bulan Bintang, PKB, dll. Beberapa aktifitas lain kelompok islam dan pengaruhnya dalam partisipasi politik adalah pengajuan kebijakan public dan aksi penolakan kebijakan public seperti FPI. Penulis masih membahas arah partisipasi kelompok islam belum pada dampak positif negative partisipasinya.

### 2) Sosial

Kualifikasi masyarakat madani pada aspek social merujuk pada gerakan islam pada hadinya aktifitas keberagaman yang menyentuh pada masyarakat langsung, jika pada aspek politik kebijakan pemerintah terkadang belum mampu menyentuh pada kebutuhan masyarakat secara langsung berbeda pada gerakan islam yang mampu menjawab persoalannya seperti, Organisasi Masyarakat yaitu NU dan Muhammadiyah. Meskipun ada perbedaan prinsip yaitu muhammadiyah dengan modernitasnyadan NU dengan focus kebudayaannya akan tetapi bertemu dalam Beberapa aktivitas sosialnya.

Pembuatan lembaga pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi oleh Muhammadiyah menjawab persoalan masyarakat pada wilayah pendidikan dan NU dengan pendirin pondok pesantren salafi. Pada wilayah kesehatan masyarakat NU dan Muhammadiyah mendirikan rumah sakit yang ini sangat menjawab persoalan masyarakat. Dan aktifitas pemberdayaan masyarakat seperti Anshor oleh NU untuk memberdayakan pemuda, IPM dan IMM untuk pemberdayaan pelajar, dan Aisyah juga Muslimat guna pemberdayaan perempuan di masyarakat Indonesia.

### 3) Ekonomi

Jika kontribusi gerakan islam pada aspek politikdan social berperan mengakar pada masyarakat berbeda pada wilayah ekonomi yang masih minim. Tercatat dalam sejarah gerakan terbesar kelompok islam di Indonesia adalah pada kelomkok Sarekat Dagang Islam (SDI) dengan latar belakang kecemburuan social pada kekuasaan paasar oleh kelompok dagang cina, gerakan ini diinisiasi oleh Haji Samanhudi dan diubah arah gerakannya saat pra kemerdekaan oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto atau HOS Tjokroaminoto.

Pada pertengahan orde baru sekitar tahun 1980 an, ketika Suharto berusaha melakukan pendekatan terhadap kelompok muslim untuk mengimbangi menurunnya dukungan militer, ia menginisiasi secara pribadi pendirian bank islam, bang muamalat yang sistemnya tidak memberlakukan “bunga”, melainkan pembagian hasil. Bersamaan dengan itu pak Harto beserta wakilnya yang di ganti oleh Bj. Habibi mendirikan organisasi intelektual modernis yang dikenal dengan Ikatan Cendekiawan Muuslim Indonesia (ICMI), dan organisasi ini dianggap sebagai wahana mobilisasi politik oleh kalangan muslim kelas menengah juga dikauirkan digunakn sebagai alat politik kelompok sectarian.

Partisipasi kelompok islam pada wilayah ekonomi Paska jatuhnya orde baru bisa dikatakan kelompok kelompok underground dan kelompok islam merasakan kemerdekaan berdemokrasi dalam berbagai aspek yang lebih luas, seperti pengembangan bank syari’ah daan unitnya yang lebih kecil seperti *Baitul Mal Wattamawil*. Perbankan Syari’ah yang mulanya dilembagakan hanya oleh bank Muamalat Indonesia, kini dioperasikan oleh bank bank konvensional. System syari’ah telah berperan sebagai sebuah alternative bagi perbankan konvensional.

#### 4) Budaya

Untuk sumbangsih tradisi kelompok islam menuju masyarakat madani pada wilayah Budaya akan berfokus pada kajian budaya demokrasi dan pluralisme. Beberapa traadisi islam dalam penyebarannya memang ada beberapa teori yang menjelaskan mari kita ambil satu yaitu melalui perdagangan dan kebudayaan seperti wayang juga beberapa budaya yang selaras dengan ajaran hindu dan animism sehingga di respon posisiif pada hal tersebut.

Sedangkan oleh kelompok NU mengadopsi cara cara pluralism dan pemberdayaan masyarakat sehingga oleh kelompok non islam dan perusahaanperusahaan swasta seperti Ford Foundation, The Asia Foundation, USAID, dll. Pada organisasiorganisasi kemasyarakatan yang puritan dan fundamentalis, yang memiliki semangat keagamaan yang sama engan wahabisme dan ihkwanul Muslim, biasanya lebih militan, memiliki jaringan yang bagus, dan secara financial lebih mandiri meski beberapa dari mereka juga menerima bantuan dana dari negaranegar islam timur tengah. DDI (Deawan Dakwah Islamiyah) dan gerakan tarbiyah beberapa di antaranya yang lebih eksklusif namun memiliki kinerja yang lebih Terstruktur, sistemais, dan Masif.

#### **e. Fenomena Radikalisme dan Pluralisme Pemuda Muslim Indonesia**

Pembahasankali ini akan membedah fenomena gerakan radikal dan pluralis remaja muslim Indonesia, dan pada pokok pembahasannya akan membahas secara etimologi terlebih dahulu terkait radikalisme, pluralism, dan remaja islam. selanjutnya akan mebedah terkait fenomena perilaku rsdikalisme, dan pluralisme melalui data, riset, dan kutipan ahli dalam hal tersebut. Setelah membedah hal tersebut akan dilanjutkan di point 3 terkait teropong kedepan pada relevansi fenomena hari ini dengan wacana masyarakat madani di Indonesia.

##### 1) Paradigma Radikalisme

Ketika mendefinisikan makna radikal tidak bisa dipungkiri akan ada pandangan ahli terkesan menyuduttkan kelompok radikal dan berdasarkan fenomena, ada yang merujuk pada makna netral, dan ada yang mendefinisikan bahwa radikal adalah makna jihad sesungguhnya. Terlepas bagaimanapun definisinya penulis menjelaskan definisinya dalam beerbagai perspektif dan akan sangat tergantung makan pembaca mana yang lebih sesuai dari definisi definisi tersebut.

Perspektif pertama, paradigma radikalisme didasarkan pada keyakinan tenang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang dinilai sebagai yang

paling benar dan menganggap yang lain salah. Ia sangat tertutup, biasanya sulit berinteraksi dan dan hanya saling berbicara dengan kelompoknya sendiri. Terkadang pandangan ini minim dalam memberikan keterbukaan berpikir terhadap kelompok lain. Seringkali radikalisme memiliki figure yang dia anggap paling benar dan meolak figurfigur kelompok lain dalam hal ini konsumsi pengetahuan mereka didasarkan pada siapa yang menyampaikan bukan pada apa yang disampaikan. Paham ini mencita citakan perbedaan perbedaan yang ada dengan menggunakan instrumen kebenaran berdasarkan pemahannya sendiri.

Implementasi radikalisme pada tindakan dan gerakan ditandai oleh perjuangan ekstrem dengan berdasarkan pemahaman tertentu untuk merubah suatu keadaan yang di anggap salah menuju keadaan benar dalam pandangan mereka. Dalam radikalisme saat berpolitik contoh tindakan makar, revolusi, demonstrasi, dan protes social yang tidak jarang anarkis. Landasan mereka juga tidak jarang di dasarkan oleh keseagamaan karakter individu yang memang sudah keras dan semakin terjustifikasi oleh ajaran yang memperbolehkan melakukan tindak kekerasan.

Dalam kajian ideology, radikalisme terbagi menjadi dua kutub: pertama ideology kompromis yang berkaitan dengan penerimaan pembangunan, kemajuan teknologi, dan konsepkonsep modernitas lainnya. Kelompok yang berpaham demikian disebut kelompok radikal kanan, sedangkan dikutub lain adalah ideology non kompromis yang mendasarkan pada nilai nilai masalah atau kelompok sejenisnya yang dilaksanakan pd konteks atau wilayah lain, dalam konteks politik cara perubahan social yang diambil terkadang upaya revolusi untuk merubah keseluruhan system dengan system yang dia anut. Dalam istilah lain radikalisme kanan maupun kiri adalah lawan dari kelompok moderat. Sehingga perilaku radikal juga dapat ditemukan dalam ideologi yang berlawanan seperti modernis maupun tradisional, sekularis maupun puritanis, liberalis maupun konservatif, dan globalis dengan nasionalis. Salah satu indicator yang dpt digunkn adalah ketika dalam satu kelompok tidak mengenal kelompok lain, berpandangan kelompoknya yang paling benar dengan menghakimi kelompok lain. dan bertindak ekstrim dalam menyikapi perbedaan, bisa disimpulkan bahwa dalam kelompok tersebut berpaham radikalisme.

Perspekif kedua secara etimologi arti kata radikal memiliki makna yang netral atau setidaknya tidak meruju kekerasan ataupun pada hal yang negative. Kata radikal memang sering dikaitkan dengan metode mencapai perubahan yang besar dalam suatu kondisi. Dalam kamus bahasa Inggris Collin Cobuild, English Dictionary For Advanced Learners (2001) orang radikal didefinisikan sebagai *“the radical people believe that there should be a great change and try to bring about these changes”* (orang radikal percaya bahwa perubahan besar harus dilakukan dan mereka mencoba melakukan perubahan itu). Merujuk pada definisi tersebut kata radikal digunakan sebagai senjata dalam pergerakan kelompok kelompok yang ingin melakukan perubahan secara besar besaran dan mengakar. Sehingga beberapa fenomena radikal yang terjadi seperti demonstrasi dalam menggulingkan kekuasaan, makar, dan bgerakan gerakan revolusi lain di anggap sebagai definisi radikal.

Definisi yang murni diatas hanya melihat substansi dari radikal(isme). Definisi dari perspektif substantive ini tiding menyinggung apakah perubahan besar besaran ini menggunakan cara yang damai atau kekerasan seperti kekerasan fisik maupun pengeboman (terorisme semisal). Akan tetapi sekarang ini definisi yang sering dimaknai berkonotasi negative atau cenderung dimaknai paham yang menggunakan kekerasan dalam melakukan perubahanperubahan. Paham dengan tingkat eksklusifitas tinggi terhadap kelompok lain yang berbeda paham, cenderung menyalahkan kelompok lain yang berbeda paham.

Beberapa ahli juga mendefinisikan makna radikal ini negative seperti Horace M. Kallen, dia menjelaskan tiga karakteristik radikal. Pertama, paham yang merespons dalam bentuk

evaluasi, penolakan atau penentangan gagasan, lembaga, atau nilai. Kedua, paham yang bertujuan melakukan perubahan secara mendasar atas apa yang ditolak atau di evaluasi agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ketiga, memerlukan kepercayaan tinggi dari para aktornya terhadap ideology yang mendorong perubahan mendasar dan serentk dengan tanpa kompromi dan menggunakan cara cara kekerasan. Bung karno pun juga menjelaskan bahwa radikal adalah bertindak secara serius, tidak setengah setengah, dan total dalam perjuangan, pada konteks ini radikal yang dimaksud bung karno adalah radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

## 2) Paradigma Pluralisme

Memberikan definisi pluralisme akan sama kompleksnya dengan Radikalisme, dikarenakan di Indonesia dengan Negara yang sunatullahnya memang Negara lural bahkan peradaban manusia. Akan tetapi makna yang kita pahami atau maasyaraakat secara umum berkonotasi negative. Kali ini kita akan menjelaskan pluralism bagaimana mulai dari pengertian pluralisme secara etimologi, beberapa kelompok islam Indonesia seperti; Fatwa MUI, Intelektual Islam Progresif, dan pluralism dalam Al Qura'an.

Mohamed Fathi Osman mendefinisikan Pluralisme sebagai bentuk kelembagaan dimana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan, maknanya lebih dari sekedar toleransi moral atau koeksistensi psif. Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan persaan pribadi, sementara koeksistensi adalah sematamata penerimaan terhadap pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konflik. Pluralisme, disatu sisi, mensyaratkan ukuran ukuran kelembagaan dan legal yang melindungi dan mensyahkan kesetaraan dan mengembangkan rasa persaudaraan diantara manusia sebagai pribadi atau kelompok, baik ukuran ukuran itu bersifat bawaan taupun perolehan. Selanjutny, pluralismenmenuntut suatu pendekatan yang serius terhadapmemahami pihak lain dan kerjasama yang membangun untuk kebikn smua. Setiapmanusia harusnyaa menikmati hak hak dan kesempatan kesempatan yang sama, dan seharusnya memenuhikewajiban kewajiban yang sama sebagai warganegara dan warga duniaa. Setiap kelompok semestinya memiliki hak untuk berhimpun dab berkembang, memelihara identiaas dan kepentingannya, dan menikmati kesetaraan hak hak dan kewajiban kewajiban dalam Negara dunia internasional.

Masih selaras dengan definisi plurlisme M. fathi Osman. Budhy Munawar Rachmaan menjelaskan definisi Pluralisme mensyaratkan dialog sebagai elemenpenting dalam berinteraksi dengan agama agama lain. Dialog sebagai elemen penting dalam berinteraksi dengan agama agama lain. Dialog antaar agama bukan berujuan menciptakan satu agama tunggal dan final, melainkan memperkaya dan merayakan kepelbagaian yang semakin berkembang dan berarti dalam agama agama. Dialog korelasional ini harus disertai dengan tanggung jawab global dan karena itu pendekatannya bukanlah *eklesiontris*, *kriosentris*, atau *teosentris*, melainkan soteriosentris (berpusat pada keselamatan) yang didasarkan paada dasar yang sama, yaitu tanggung jawab global terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan.

Dasar bersama bagi pluralism dan dialog antar agama adalah soalpenderitaan manusia dan kerusakan ekologi, atau dengan kata lain kesejahteraan manusia dan lingkungannya. Dasar bersama dialog ini penting ditetapkan agar tidak terjadi *kelesuan moral* sehingga dapat mengambil keputusan etis bersama demi kesejahteraan manusia dan bumi. Terobosan konkret yang dapat dibuat adalah merumuskan sesuatu etika global bagi tindakan bersama. Eika global ini dapat menjaadi kenyataan jika dilakukan dialog global terlebih dahulu sehingga akhirnya tanggung jawab global dapat dilakukan bersama.

Teologi pluralism menegaskan bahwa menjadi religious berarti menjalani kehidupan yang bertanggung jawab secara global. Dengan tanggung jawab secara global. Dengan tanggung jawab global yang menjadi tugas etis bersama, maka semua umat beragama bisa lebih saling menghidupkan dan memperbaiki pemahaman. Adanya paham pluralism bukan untuk mengangganggap kelompok lain benar dan kita benar tapi pada konteks memahami kenapa mereka berpaham sedemikian dan bukan untuk menghakimi. karena itu bukan saja tentang tanggung jawab keagamaan tapi juga tanggung jawab sebagai manusia.

### 3) Pandangan Beberapa Kelompok Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak mengeluarkan fatwanya pada bulan Juli dua ribu lima tentang pengharaman pluralisme, liberalism, dan sekularisme. Pembahasan terkait tiga tema tersebut khususnya pluralism menjadi meningkat di Indonesia. Pro kontra mulai timbul mulai dari kalangan MUI, kelompok islam progresif, islam liberal, pesantren, kutbah kutbah shalat jum'at, dan diskusi diskusi organisasi mahasiswa maupun lembaga swadaya masyarakat bahkan masyarakat itu sendiri. Viralitas fenomena ini juga tak luput dari sorotan media baik, msjalah, maupun akademisi (jurnal)

Keputusan MUI ini juga didasarkan pada tiga pertimbangan pengharaman yaitu: pertama, bahwa pada akhir-akhir ini menurut MUI telah berkembang paham sekularis, liberalism, dan pluralism di masyarakat Indonesia, kedua bahwa berkembangnya sekularisme, liberalism, dan pluralism dikalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga beberapa kalangan masyarakat meminta MUI mengeluarkan fatwa tersebut dan yang ketiga untuk pedoman oleh umat islam.

Sedangkan redaksi definisi pluralism menurut MUI adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama relative; oleh karena itu setiap agama tidak boleh mengklaim agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralism agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Dalam masalah akidah dan ibadah umat islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti harm mencampurkan adukkan akidah dan ibadah umat islam dengan pemeluk agama lain. Dalam masalah social yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Sehingga umat islam bersikap inklusi, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Kelompok islam progresif mendefinisikan pluralisme berangkat dari kata pluralitas yaitu merupakan kenyataan untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralism. Sebab, tidak bisa dipungkiri pluralitas mengandung bibit perpecahan inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Pluralism memungkinkan terjadinya kerukunan, dan kesetaraan. Pluralism memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik.

Pluralisme juga di jelaskan oleh tokoh terkemuka cendekiawan muslim Indonesia yaitu Azyumardi Azra, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai ada kesalahpahaman tentang arti pluralism yang dipakai sebagai acuan oleh MUI, dalam diskusi akademik beliau menjelaskan dengan sederhana yaitu mengakui bahwa didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terdapat bukan hanya orang islam, tetapi ada pemeluk agama lainnya. Kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing masing mempunyai hak yang sama untuk eksis bagaimana juga agama yang kita anut mempunyai hak atas keberadaannya. Maka yang harus dibangun adalah persaan saling menghormati.

Dalam tafsir Ahmad Syafi'i Maarif mantan ketua umum PP Muhammadiyah juga menjelaskan bahwa pluralisme mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal

keberagamaan di segala bidang kehidupan, seperti agama, social, politik, budaya, tradisi local, jumlah follower, like, subscriber, dst. Dijelaskan juga bahwa dalam pluralism yang penting juga adalah moalitas public yang tidak dimiliki oleh umat islam saja akan tetapi juga agama lain.

#### 4) Ayat ayat Al Qur'an landasan pluralism

Sering kitadengar ayat ini yaitu (Qs. Al Hujurat: 13) *“bahwa sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki laki dan perempuan lalu menjadikanmu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”* dalam tafsir Ahmad Syafii Maarif, bukan sekedar untuk saling mengenal, melainkan secara implisit di sana ada juga himbauan untuk bertukar nilai nilai peradaban untuk saling memberi dan menerima keberbagaian, atau gagasan yang mengakui kemajemukan realitas. Ia mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman disegala aspek kehidupan. Pluralism bukan mengakui semua agama sah. Bukan itu masalahnya, jika ada yang berpandangan seperti itu, menurutnya, paham yang *konyol*. Syafii menyebut tafsiran seperti itu adalah kampungan.

Masih dalam dalam ayat Al Qur'an juga disebutkan bahwa, *“manusia itu adalah satu umat (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan beserta mereka dia turunkan kitab kitab dengan benar, supaya dia bisa member keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”* (Qs. 2: 213) dari situ muncul tiga fakta: (1) kesatuan umat dibawah satu tuhan; (2) kekhususan agama agama yang dibawa oleh para nabi dan (3) peranan wahyu atau kitab suci dalam mendamaikan perbedaan diantara umat beragama. Ketiganya adalah konsepsi fundamental Al Qur'an tentang pluralisme agama. Di sisi lain konsepsi menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia tidak mengingkari kekhususan berbagai agama dan kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama. Dengan terbuka memahami dan mempelajari nilai nilai positif agama lain maka umat beragama Indonesia akan minim muncul sikap eksklusifitas, sehingga akan jauh dari konflik antar umat.

Dalam ayat lain juga mengemukakan tentang *“jikalau tuhanmu menghendaki, tentu dia akan menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”* (Qs. 11: 18). Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kalau tuhan mau, dengan dengan sangat mudah, akan dapat menciptakan manusia yang sama, tidak ada perbedaan pandangan, dan atas dasar inilah salah satu bentuk ujian pada manusia sejauh mana mampu menghargai sesama ciptaan tuhan.

#### **f. Fenomena Radikalisme di Kalangan Pemuda Islam Indonesia**

Kaum pemuda sebagaimana dikatakan unesco adalah mereka yang berusia 13 sampai lima belas tahun sebagaimana dikatakan oleh UNESCO. Berbeda dengan WHO yang secara operasional menetapkan batas usia 10 sampai 20. Sedangkan di Indonesia sendiri usia pemuda menggunakan mendepati batasan dari PBB yaitu 14 sampai 24 tahun.

Jika paparan diatas adalah tolak ukur pemuda dengan usia, beberapa ahli berikut akan menjelaskan pemuda dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tokoh psikoanalisis terkemuka dunia Sigmund Freud mendefinisikan remaja sebagai masa turbulensi, tidak dapat diperkirakan *mercurial* dan *tormented*. Dikatakan turbulensi karena dilihat dari segi pengembangan fisik dan pada segi perilaku remaja sudah merasa independen dan bebas dari orang tua. Sehingga dapatlah kita lihat bahwa di masa ini pemuda islam Indonesia sudah dapat mandiri berpikir untuk berideologi seperti apa, dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah ideology itu lekat dalam kesadaran?



Tapi militansi pemuda muhammadiyah tak membuat pergerakannya mundur sampai saat ini. Muhammadiyahpun berkembang dalam beberapa kelompok islam muda seperti IPM, IMM, Aisyah, dan banyak lagi. Gerakan ini sangat lekat sekali dengan apek Egalter juga pada wacana masyarakat madani di Indonesia.

Lalu bagaimana elevansi masyarakat madinah dalam konteks Keindonesiaan? Sungguh sangat mengejutkan jika dikaji pada genealogi dan kandungan serta visi pancasila yang merupakan landasan filosofis dan ideologis bangsa dan Indonesia, karena disana ditemukan banyak kemiripan. Pertama, masyarakat dan bangsa Indonesia bersifat majemuk dan memiliki sejarah konflik, petikaian dan perang antar suku. Juga konflik antar komunitas agama. Pancasila merupakan terobosan folisofis, ideologis dan historis sebagai *common denominator* dan pemersatu bangsa yang dilahirkan melalui proses negosiasi dan partisipasi yang dipartisipsii oleh komunits, suku, ras, dan agama di Indonesia.

Selanjutnya, isi dan semangit kelima sila itu mengajak masyarakat nusantara tetap menjag kearifan lokal yang telah berjalan dan dianggap baik (*alma'ruf*), namun dalam waktu yang ama diajak melakukan transendensi ke tataran yang lebih tinggi, yaitu pemahaman, keyakinan dan penghayatan akan nilai nilai ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu, beragam agama memperoleh tempat terhormat dan sama di hadapan undang undang Negara.

Kebertuhanan bukanlah pilihan hidup ruang sunyi sepi, melainkan yang memancarkan inspirasi, wawasan, komittmen, dan agenda keempat sila lainnya. Yaitu menjunjung tinggi dan membela nolai nilai kemanusiaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan (*al qitsh*) dalam rangka mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang madani dan bersatu dalam rumah Negara Indonesia. Siapa pun yang duduk dalam perwakilan dan pemerintahan mesti memiliki intefgritas, kaoabilitas, arif dan setia untuk senantiasa memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan nilai, visi dan tujuan paksis pancasila, sesungguhnya Indonesia memiliki peluang sangat besar menjadi pusat peradaban luhur yangturut memperkaya perdaban dunia. Pesan kebenaran (al halaqq) dan kebaikan (al khair) islam bersifat normative universal, mau tidak mau, mesti diformulasikan dalam format budaya dan kearifan local (*al ma'ruf*) yang memerlukan fsilitas dan perlindungan Negara agar pohon kebajikan itu (*syajarah thayyibah*) tumbuh subur dan rindang, sehingga kehadiran islam benar benar dirasakan sebagai: *rahmattan li al indonesiyyin* Rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia (Komaruddin; 139).

#### 4. Kesimpulan

Pada tali merah perjuangan remaja islam Indonesia dengan pemahaman radikalism dan pluralismenya. Perlu di lihat sejauh mana perjuangannya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ketika memperjuangkan islam dengan membela ulama, agama, dan kelompok pertanyaannya adalah sejauh mana pengaruh dari perjuangan itusecara substantive dan menyentuh masyarakat secara luar? Apakah selesai permasalahan korupsi di Indonesia, ketimpangan kepemilikan tanah oleh oligarki yang mengeksploitasi alam? Sejauh mana tangisan buruh tani maupun buruh kota dengan perjuangan itu? Pun juga yang beridiologi pluralism keteki mengedepankan hak hak beragama apakah itu mampu menyelesaikan secara substantf peroalan masyarakat baik diwilayah pendidikan, kesehatan maupun peekonomian.

Dapatlah dilihat bahwa potensinya memang besar meunuju masyarakat madani tapi Nampak bahwa permasalahan di madinah kala itu yaitu konflik antar kelompok yang tak kunjung usiai masih terus ada. Terkadang beberapa kelompok memanfaatkan religiusitas sebagai bagian dari upaya penyelimutan komoditas. Sehingga frame tentang menjaga moralitas

public dan beragama masih perlu disatukan dalam rangkan saling memahami antar sesame dan saling membantu pada hal yang memang dibutuhkan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. (2000). *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Islam Kontenporer*. Bandung: Mizan.
- Budiargo, Dian. (2015). *Berkomunikasi Ala Net Generation*. Jakarta: Gramedia
- Fadilah, Nur. (2017). *Konsep civil society Nurcholish Madjid dan relevansinya dengan kondisi masyarakat Indonesia kontenporer*. *Al Lubb*. 2 (1): 206-225.
- Hidayat, Komarudin. (2014). *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*. Jakarta Selatan: Mizan.
- Jaiunuri, Achmad. (2016). *Radikalisme dan Terorisme: Akar Idiologi dan Tuntutan aksi*. Malang: Intrans Publising.
- Maarif, Syafii, A. (2015). *Islam dalam Bingkai Ke Indonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Munawar, Budi. (2017). *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme, Pluralisme*. Malang: Madani
- Naim, Nainun. (2014). *Islam dan Pluralisme Agama*. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Rosadi, Andri. (2008). *Hitam Putih FPI*. Jakarta Selatan: Nun Publisher.
- Tobroni. (2012). *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan*. Bandung: Karya Putra Darwati
- Yunanto, Sri. (2018). *Islam Moderat vs Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer*. Yogyakarta: MediaPressindo.